

Kamu tahu *gak* sih...



Selama empat tahun ini, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) telah berhasil melakukan **monitoring dan evaluasi** (Monev) implementasi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, *lho*.

KKB melakukan Monev Implementasi UU Ormas dengan cara melakukan pemantauan media online (dalam periode 2 Juli 2016- 1 Juli 2017).

TUJUAN PEMANTAUAN MELALUI MEDIA ONLINE:

- Mengetahui isu terkini dalam kebebasan berserikat
- Melihat pola peristiwa yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat
- Menghasilkan data untuk mengukur tingkat efektivitas implementasi UU Ormas

HASIL TEMUAN PEMANTAUAN MEDIA ONLINE TAHUN KE-4:

Jumlah peristiwa yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas ***jauh lebih banyak*** dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Yuk, cari tahu ...



rentetan peristiwa terkait isu UU Ormas yang paling banyak mencuat di media online sepanjang tahun 2016- 2017!

DES'16

- Pemerintah berencana untuk merevisi UU Ormas.
- Kewajiban mendaftar bagi OMS yang tidak memiliki SKT atau yang SKT-nya sudah kedaluwarsa di beberapa daerah di Indonesia.

JAN'17

Isu penertiban dan pembubaran organisasi masyarakat sipil yang dianggap anti-Pancasila, anti-NKRI, dan intoleran.

MEI'17

Pemerintah mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh HTI.

JUN'17

- Cara membubarkan OMS yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (anti-Pancasila) dan paham radikal, dalam hal ini cara untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.
- Wacana pembubaran OMS yang melakukan tindakan main hakim sendiri dan persekusi.

DAERAH TEMPAT TINGGALMU JUGA TERMASUK GAK NIH?

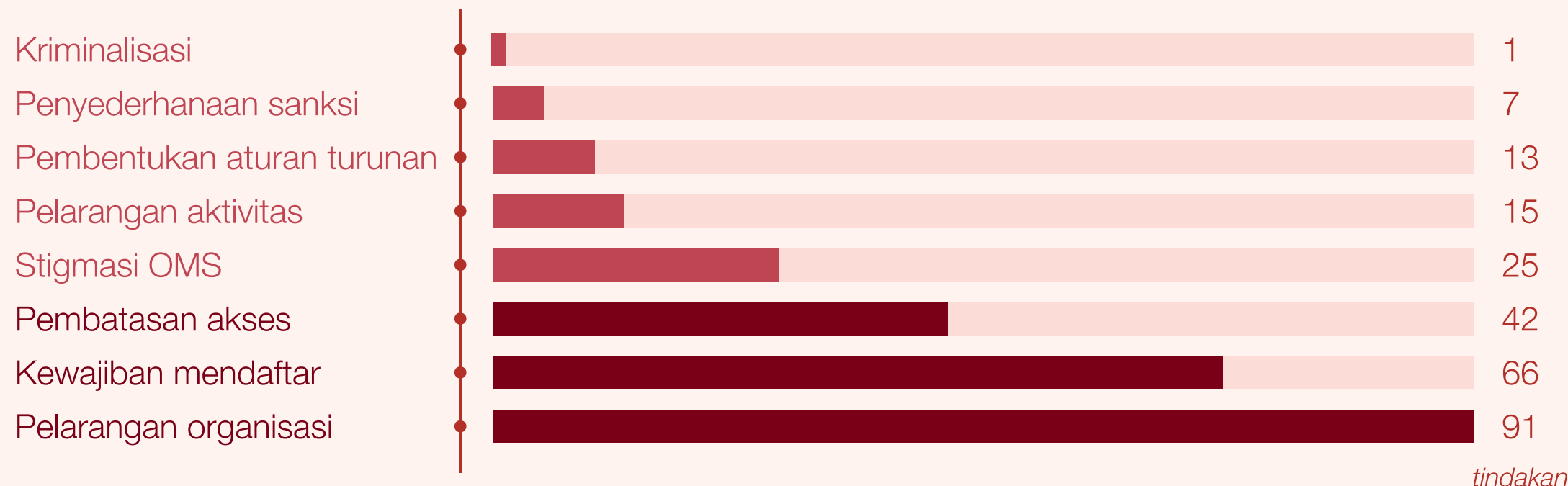
Hasil temuan lokasi implementasi UU Ormas tahun ke-4 menunjukkan bahwa ruang lingkup implementasi UU Ormas memasuki tahun ke-4 semakin meluas ke banyak provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.



TEMUAN HASIL 8 TINDAKAN IMPLEMENTASI UU ORMAS

Yuk, simak!

Jenis Tindakan yang Terjadi Sepanjang Periode 2 Juli 2016 – 1 Juli 2017



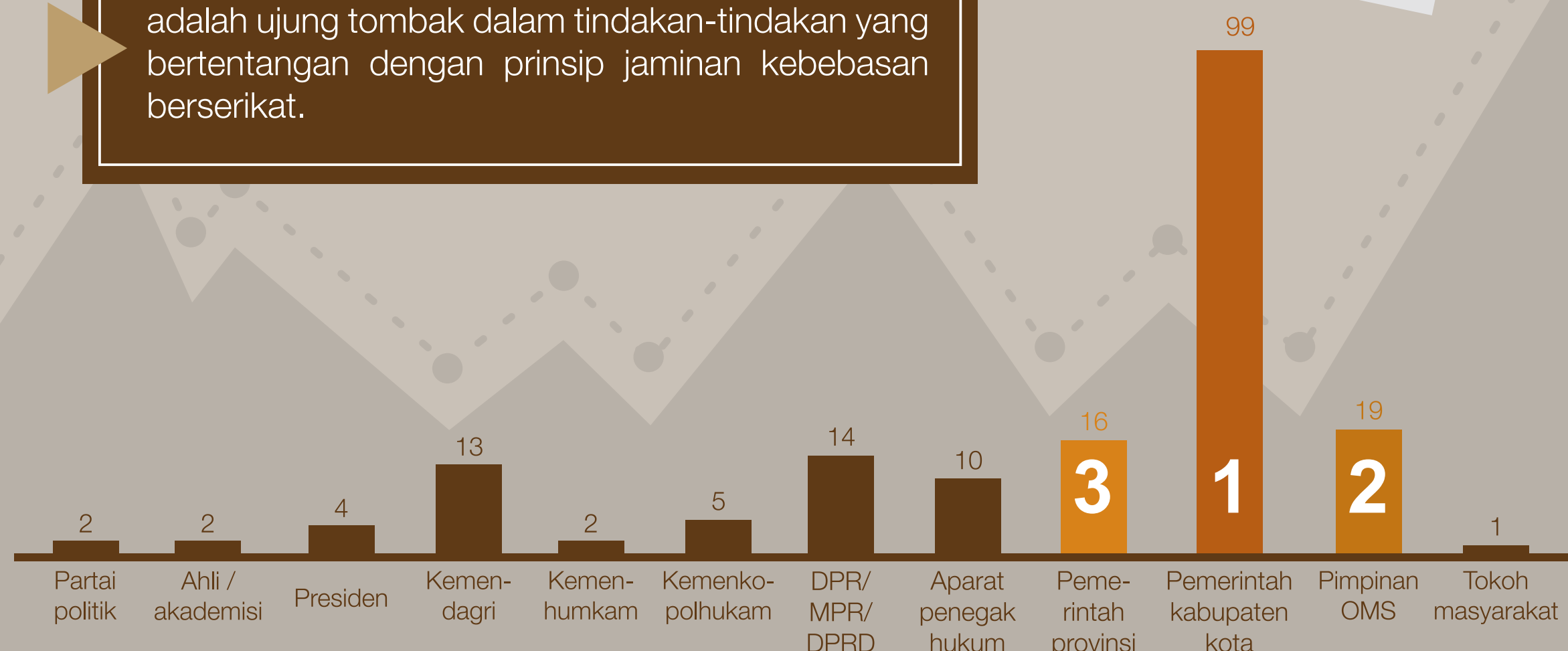
Hasil temuan periode tahun ke-4 menunjukkan bahwa kategori pelarangan organisasi mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan November 2016 dengan 4 tindakan ke bulan Desember 2016 dengan 11 tindakan. Kemudian, mengalami peningkatan kembali pada bulan Januari dengan 18 tindakan.

PELAKU TINDAKAN YANG MENENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT

Peningkatan jumlah peristiwa dari periode tahun ke-3 ke periode tahun ke-4 menyebabkan meningkatnya penyebaran jumlah pelaku.

Hasil menunjukkan bahwa pelaku di tingkat lokal adalah ujung tombak dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan berserikat.

12 kategori pelaku pada periode tahun ke-4, yaitu:



KENALI SIAPA SAJA *KORBAN* NYA !

Pada periode tahun ke-4 ini, hasil temuan menunjukkan bahwa **peta persebaran korban dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan berserikat semakin banyak dan meluas ke berbagai daerah di Indonesia.**

5 jenis kategori korban yang terdampak atas implementasi UU Ormas



OMS yang tidak memiliki SKT dan/atau tidak terdata



OMS dengan SKT kedaluwarsa



Lembaga/OMS Asing



OMS yang dianggap anti-Pancasila dan anti-NKRI



OMS yang dianggap terlarang, intoleran, meresahkan atau suka berbuat onar, dan menyalahgunakan izin demi kepentingan pribadi